



ANALISIS PERAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI SUMATERA SELATAN SEBAGAI WALI DATA DAERAH DALAM IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SATU DATA INDONESIA

Dzaky Kartapala

^{1,2,3} Sistem Informasi, Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang

E-mail: dzakykartapala7@gmail.com

ABSTRACT

The implementation of the One Data Indonesia (Satu Data Indonesia - SDI) policy at the regional level mandates integrated and collaborative data governance among local government institutions. The Communication and Information Office (Diskominfo) of South Sumatra Province plays a central role as the Regional Data Guardian (Wali Data Daerah) in coordinating and facilitating sectoral data. This study aims to analyze the effectiveness of Diskominfo South Sumatra Province in fulfilling its role as a Regional Data Guardian—specifically in coordinating, verifying, and disseminating sectoral data—while identifying the organizational and technical barriers encountered in the field. A descriptive qualitative approach was employed, utilizing participatory observation and document analysis conducted during the One Data Internship Program from April to June 2026 at Diskominfo South Sumatra Province. The findings reveal that Diskominfo has performed its duties as a Data Guardian through technical guidance, the operation of the South Sumatra One Data portal, and the management of six core digital infrastructure datasets (internet bandwidth, Community Information Groups, blank spots, subdomains, applications, and public communication management). However, full implementation is constrained by the static nature of certain datasets, delays in periodic data updates from Line Agencies (OPD) acting as data producers, and restricted access rights regarding data processing. To address these challenges, Diskominfo adopted adaptive strategies, including logging technical constraints faced by OPDs and strengthening digital services supporting Electronic-Based Government Systems (e-Government/SPBE). This study concludes that the success of the One Data policy at the regional level relies not merely on information system readiness and ICT infrastructure, but heavily depends on institutional commitment, strict enforcement of reporting deadlines, and an established data-sharing culture across regional government agencies.

Keywords: *One Data Indonesia, Regional Data Guardian, Diskominfo South Sumatra, Data Governance, e-Government*

Article History

Received: September 2026

Reviewed: September 2026

Published: September 2026

Plagiarism Checker No
237.u873247.fh8374

Copyright : Author

Publish by : Kohesi



This work is licensed
under a [Creative
Commons Attribution-
NonCommercial 4.0
International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

**ABSTRAK**

Pelaksanaan kebijakan Satu Data Indonesia (SDI) di tingkat daerah membutuhkan tata kelola data yang terintegrasi dan kolaboratif antarlembaga pemerintah daerah. Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Sumatera Selatan memegang peran sentral sebagai Wali Data Daerah dalam mengoordinasikan dan memfasilitasi data sektoral. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas peran Diskominfo Provinsi Sumatera Selatan sebagai Wali Data Daerah dalam mengoordinasikan, memverifikasi, dan menyebarkan data sektoral, serta mengidentifikasi hambatan organisatoris dan teknis yang dihadapi di lapangan. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif berbasis observasi partisipatif dan studi dokumen yang dilaksanakan selama pelaksanaan Program Magang Satu Data periode April hingga Juni 2026 di Diskominfo Provinsi Sumatera Selatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Diskominfo telah menjalankan fungsi Wali Data melalui pembinaan teknis, pengoperasian portal Satu Data Sumsel, serta pengelolaan enam dataset utama infrastruktur digital (penyediaan *bandwidth*, Kelompok Informasi Masyarakat, *blankspot*, *subdomain*, aplikasi, dan komunikasi publik). Namun demikian, implementasinya terhambat oleh sifat data sektoral yang statis, keterlambatan pembaruan data secara berkala dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) produsen data, serta keterbatasan hak akses dan otorisasi pengolahan data. Untuk mengantisipasi kendala tersebut, Diskominfo melakukan strategi adaptasi melalui pendataan kendala teknis OPD dan penguatan layanan digital pendukung Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Penelitian ini menyimpulkan bahwa keberhasilan kebijakan Satu Data di daerah tidak hanya bergantung pada kesiapan sistem informasi dan infrastruktur TIK, tetapi sangat dipengaruhi oleh komitmen institusional, regulasi tenggat waktu yang tegas, dan peningkatan budaya berbagi data (*data sharing culture*) antar-OPD.

Kata Kunci: *Satu Data Indonesia, Wali Data Daerah, Diskominfo Sumatera Selatan, Tata Kelola Data, e-Government*

1. PENDAHULUAN

Di era transformasi digital pemerintahan, ketersediaan data yang berkualitas merupakan fondasi utama dalam perumusan kebijakan publik yang presisi dan tepat sasaran (*evidence-based policy*). Tata kelola pemerintahan modern mengharuskan setiap keputusan strategis, mulai dari perencanaan pembangunan daerah hingga alokasi anggaran, didasarkan pada basis data empiris yang dapat dipertanggungjawabkan. Kendati demikian, praktik penyelenggaraan data pemerintahan di Indonesia selama bertahun-tahun menghadapi hambatan klasik berupa fragmentasi data, duplikasi informasi, serta minimnya standar baku antar-instansi (*data silo*). Permasalahan ego sektoral antar-Organisasi Perangkat Daerah (OPD) kerap kali mengakibatkan data statistik sektoral menjadi sulit diintegrasikan dan diakses secara terpadu.



Guna mengatasi tantangan sistemik tersebut, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (SDI). Kebijakan nasional ini dirancang untuk mewujudkan keterpaduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan melalui pemenuhan empat prinsip utama tata kelola data: (1) Standar Data, (2) Metadata Baku, (3) Interoperabilitas Data, serta (4) Penggunaan Kode Referensi dan Data Induk. Dalam struktur kelembagaan SDI, penetapan peran terbagi secara tegas menjadi Pembina Data, Walidata, Koordinator SDI, dan Produsen Data.

Di tingkat daerah, Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Sumatera Selatan memegang posisi kunci sebagai Wali Data Daerah, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 14 Tahun 2016 serta regulasi teknis pendukung seperti Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025. Dalam kapasitas tersebut, Diskominfo bertanggung jawab untuk mengoordinasikan pengumpulan, pengolahan, verifikasi, validasi, dan penyebarluasan data statistik sektoral yang dihasilkan oleh seluruh OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Operasionalisasi peran ini dijalankan secara bersinergi oleh dua unit kerja utama, yaitu Bidang Statistik yang berfokus pada analisis data sektoral, serta Bidang *e-Government* yang mengelola infrastruktur TIK, jaringan, dan portal integrasi data daerah.

Meskipun secara regulasi dan infrastruktur sistem informasi kerangka kerja Wali Data telah dibangun melalui pengoperasian portal Satu Data Sumsel dan *Dashboard* daerah, implementasinya di lapangan masih menemui berbagai kendala operasional yang kompleks. Berdasarkan hasil observasi langsung selama pelaksanaan Program Magang Satu Data periode April hingga Juni 2026, ditemukan dinamika tata kelola yang belum optimal. Sebagian besar data sektoral yang dikumpulkan bersifat statis dan mengalami keterlambatan pembaruan (*data latency*) dari OPD produsen data. Selain itu, ketatnya pembatasan hak akses dan otorisasi teknis demi menjaga keamanan informasi turut memperpanjang birokrasi verifikasi data. Fenomena ini mengindikasikan adanya kesenjangan (*gap*) antara idealisme regulasi SDI dengan realitas budaya berbagi data (*data sharing culture*) di tingkat OPD.

Oleh karena itu, kajian mendalam mengenai dinamika peran Diskominfo Provinsi Sumatera Selatan sebagai Wali Data Daerah menjadi sangat krusial. Penelitian ini bertujuan untuk menguraikan secara kritis bagaimana peran kelembagaan tersebut dijalankan, mengidentifikasi faktor-faktor penghambat secara organisatoris maupun teknis, serta merumuskan rekomendasi pembenahan tata kelola data untuk mendukung pencapaian Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan keterbukaan informasi publik di Provinsi Sumatera Selatan.

2. METODE PENELITIAN

2.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Pendekatan ini dipilih karena mampu mendeskripsikan, menguraikan, dan menganalisis secara mendalam mengenai fenomena tata kelola data pemerintahan, peran kelembagaan, serta dinamika interaksi antar-organisasi yang tidak dapat diukur secara kuantitatif. Fokus kualitatif diarahkan pada



pemahaman kritis terhadap implementasi peran Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Sumatera Selatan sebagai Wali Data Daerah dalam kerangka kebijakan Satu Data Indonesia (SDI).

2.2 Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini diklasifikasikan menjadi dua jenis, yaitu:

2.2.1. Data Primer

Data yang diperoleh secara langsung melalui aktivitas observasi partisipatif dan pencatatan lapangan (*field notes*) selama peneliti bertugas di lingkungan Diskominfo Provinsi Sumatera Selatan, khususnya pada Bidang *e-Government* dan Bidang Statistik. Data primer meliputi catatan proses verifikasi, input, dan pemutakhiran 6 dataset utama sektor komunikasi dan informatika pada portal resmi dan catatan inventarisasi kendala teknis dan birokrasi yang dihadapi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) produsen data saat proses pengiriman data sektoral.

2.2.2 Data Sekunder

Data pendukung yang diperoleh melalui penelusuran dokumen-dokumen resmi, regulasi, dan literatur relevan, meliputi peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan dokumen profil instansi, Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK), serta publikasi data pada portal *Dashboard* Sumsel dan situs resmi Diskominfo Provinsi Sumatera Selatan.

2.3 Teknik Pengumpulan Data

2.3.1 Observasi Partisipatif (*Participatory Observation*)

Peneliti terlibat langsung dalam kegiatan operasional harian pengelolaan data di Diskominfo Provinsi Sumatera Selatan. Aktivitas observasi mencakup alur pengolahan data sektoral, tata cara penggunaan sistem/portal data, serta dinamika koordinasi teknis antar-bidang dan antar-instansi.

2.3.2 Studi Dokumentasi (*Document Analysis*)

Peneliti melakukan penelaahan sistematis terhadap regulasi pemerintah, Standar Operasional Prosedur (SOP), laporan kinerja instansi, serta arsip data sektoral untuk memahami landasan hukum dan fungsi formal Wali Data Daerah.

2.3.3 Pencatatan Hambatan Operasional (*Operational Log/Issue Tracking*)

Menghimpun dan mengelompokkan data kendala yang ditemukan selama interaksi dengan OPD produsen data, baik kendala terkait keterlambatan data, masalah format/standar data, hingga keterbatasan otorisasi sistem.

2.4 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini menerapkan model analisis kualitatif interaktif (*Interactive Model Analysis*) dari Miles, Huberman, dan Saldana, yang meliputi tiga tahapan utama secara berkesinambungan. Tahap pertama adalah reduksi data (*data reduction*), di mana peneliti menyeleksi, memfokuskan, menyederhanakan, dan mengabstraksikan data kasar hasil



observasi partisipatif dan studi dokumentasi di lapangan. Pada tahap ini, data yang berkaitan langsung dengan pelaksanaan peran Wali Data, pengolahan dataset sektoral, dan hambatan tata kelola dikelompokkan secara tematis, sementara informasi yang tidak relevan dieliminasi untuk mempertegas fokus kajian.

Tahap berikutnya adalah penyajian data (data display), yaitu menyusun sekumpulan informasi yang telah terorganisasi ke dalam bentuk teks naratif yang terstruktur, tabel deskriptif, serta matriks alur tata kelola data guna memudahkan pemahaman terhadap fenomena yang diteliti secara menyeluruh. Tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi (conclusion drawing/verification), di mana peneliti merumuskan makna mendalam dari data yang telah dianalisis untuk menjawab rumusan masalah mengenai efektivitas peran Diskominfo sebagai Wali Data Daerah serta kendala operasional yang dihadapi. Kesimpulan awal ini terus diverifikasi dengan menguji kembali kesesuaian antara fakta empiris di lapangan dan teori tata kelola data (data governance) guna menghasilkan kesimpulan yang sah dan teruji.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Pelaksanaan Peran Diskominfo Provinsi Sumatera selatan sebagai Wali Data Daerah

Implementasi kebijakan Satu Data Indonesia (SDI) di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan menempatkan Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) pada posisi strategis sebagai Wali Data Daerah. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 dan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 14 Tahun 2016, Wali Data memiliki wewenang untuk mengoordinasikan, memverifikasi, memvalidasi, serta mendiseminasikan data statistik sektoral yang bersumber dari seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebagai produsen data. Penguatan peran kelembagaan ini dipertegas melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 yang mengatur nomenklatur pelaksanaan pengumpulan data statistik sektoral dan penyelenggaraan walidata pendukung di tingkat daerah.

Berdasarkan hasil pengamatan dan inventarisasi pada portal data resmi Diskominfo Provinsi Sumatera Selatan, terdapat enam dataset utama yang dipublikasikan dan dikelola secara berkelanjutan untuk mendukung infrastruktur digital dan transparansi publik. Keterangan mengenai keenam dataset tersebut disajikan pada Tabel berikut:



No	Nama Dataset Sektoral	Deskripsi dan cakupan Informasi	Fungsi Strategis Tata Kelola
1	Data Penyediaan Bandwidth Internet	Rekapitulasi kapasitas dan alokasi bandwidth internet yang disediakan untuk operasional seluruh OPD Pemprov Sumsel.	Pengawasan efisiensi dan pemerataan akses jaringan TIK pemerintahan.
2	Data Jumlah Kelompok Informasi Masyarakat (KIM)	Pendataan kelembagaan KIM yang aktif sebagai mitra penyebaran informasi publik di tingkat kabupaten/kota.	Penguatan saluran komunikasi publik berbasis pemberdayaan masyarakat.
3	Data Kominfo <i>Blankspot</i>	Pemetaan wilayah di Provinsi Sumatera Selatan yang belum terjangkau atau memiliki keterbatasan akses sinyal telekomunikasi/internet.	Dasar perencanaan pembangunan infrastruktur menara dan jaringan komunikasi daerah.
4	Data Website Subdomain	Inventarisasi seluruh nama domain dan subdomain resmi milik instansi dan OPD di bawah lingkup Pemprov Sumsel.	Pemeliharaan standar tata kelola nama domain dan keamanan situs pemerintah.
5	Data Aplikasi	Pendataan aplikasi layanan publik dan aplikasi internal instansi yang dikembangkan atau dikelola oleh Diskominfo	Mencegah duplikasi aplikasi dan mendorong integrasi sistem informasi terpadu.
6	Data Pengelolaan Komunikasi Publik	Rekapitulasi kegiatan, strategi diseminasi informasi, serta pengelolaan opini publik yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah.	Evaluasi efektivitas transparansi informasi dan keterbukaan public.

3.2 Analisis Kritis Hambatan dan Kesenjangan Tata Kelola Data (Data Governance Gap)

3.2.1 Keterlambatan Pembaruan Data dari OPD Produsen Data (Data Latency)

Sebagai Wali Data, Diskominfo bersifat fasilitatif dan mengandalkan pasokan data masukan dari OPD selaku produsen data. Dalam praktiknya, ditemukan tingkat kedisiplinan dan respon pembaruan data dari berbagai OPD yang masih beragam dan cenderung lambat. Keterlambatan penyerahan data statistik sektoral ini mengakibatkan proses validasi dan publikasi data pada portal Satu Data Sumsel terhambat. Fenomena ini mencerminkan belum terbangunnya budaya berbagi data (data sharing culture) dan anggapan bahwa pelaporan data masih sebatas kewajiban administratif, bukan prioritas strategis.

3.2.2 Sifat Data Sektoral yang Statis

Sebagian besar dataset yang dikelola di tingkat Wali Data, seperti pemetaan blankspot, alokasi subdomain, maupun inventarisasi aplikasi, memiliki siklus perubahan yang relatif panjang (tahunan atau berdasarkan periode proyek). Sifat data yang statis ini menyebabkan tingkat frekuensi pengolahan dan entri data harian menjadi terbatas. Hal ini berpengaruh pada alur kerja operasional, di mana pemutakhiran data tidak membutuhkan intervensi teknis secara terus-menerus setiap hari, melainkan bergantung pada momentum laporan berkala dari instansi terkait.



3.2.3 Ketatnya Otorisasi Otoritas Akses dan Regulasi Keamanan Informasi

Demi menjaga keandalan sistem dan keamanan data pemerintahan sesuai standar ISO/IEC 27001 serta skema Keamanan Informasi / Computer Security Incident Response Team (CSIRT), hak akses penambahan dan perubahan data pada portal Satu Data dibatasi secara ketat hanya kepada administrator teknis tertentu. Pembatasan otorisasi ini memang penting untuk mencegah modifikasi data yang tidak sah, namun di sisi lain memperpanjang rantai verifikasi dan mengurangi fleksibilitas operasional ketika diperlukan pemutakhiran data yang cepat.

3.3 Strategi Adaptasi dan Optimalisasi Ekosistem SPBE

Guna menyikapi berbagai hambatan operasional dan ketimpangan alur data dari OPD, Diskominfo Provinsi Sumatera Selatan menerapkan langkah adaptasi dengan memperluas cakupan dukungan teknis pada ekosistem Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Langkah-langkah adaptif tersebut meliputi:

1. Inisiatif Pendataan dan Inventaris Kendala OPD

Diskominfo secara proaktif melakukan pendataan langsung terkait kendala teknis, sumber daya manusia, dan sistem yang dihadapi oleh OPD mitra dalam mengumpulkan data sektoral. Pencatatan kendala ini menjadi bahan evaluasi untuk merumuskan formulasi pembinaan teknis dan perbaikan SOP koordinasi data pada periode selanjutnya.

2. Penguatan Media Komunikasi Digital dan Aplikasi Pendukung

Untuk menjaga produktivitas operasional di luar pemutakhiran data statis, Diskominfo mengalihkan fokus pendukung pada pemeliharaan dan pengoptimalan situs resmi instansi pemerintahan, seperti pengembangan antarmuka portal Badan Penghubung Provinsi Sumatera Selatan. Pendekatan ini memastikan keterbukaan informasi publik dan kualitas infrastruktur digital daerah tetap terjaga secara optimal.

3. Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Program Magang Bedampak

Pelibatan mahasiswa melalui Program Magang Satu Data terbukti memberikan kontribusi nyata dalam membantu proses rekapitulasi data, penyusunan dokumentasi sistem, serta pelaksanaan audit kendala OPD. Program ini sekaligus memperkecil *gap* kapasitas SDM teknis di lingkungan pemerintah daerah dalam mengelola tata kelola data secara modern.

KESIMPULAN

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan mengenai peran Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Sumatera Selatan sebagai Wali Data Daerah dalam kebijakan Satu Data Indonesia (SDI), dapat disimpulkan bahwa Diskominfo telah menjalankan fungsi kelembagaan dan operasionalnya melalui sinergi antara Bidang Statistik dan Bidang e-Government. Peran tersebut diwujudkan melalui pengumpulan, verifikasi, serta publikasi enam dataset utama di sektor komunikasi dan informatika pada portal Satu Data Sumsel, yang mencakup data penyediaan bandwidth internet, Kelompok Informasi Masyarakat, pemetaan blankspot, subdomain website, inventarisasi aplikasi, serta pengelolaan komunikasi publik.

Kendati demikian, implementasi tata kelola data di tingkat daerah masih dihadapkan pada sejumlah hambatan mendasar yang bersifat organisatoris, seperti keterlambatan penyampaian



data berkala dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) produsen data, karakteristik data sektoral yang cenderung statis, serta pembatasan otorisasi akses demi menjaga keamanan informasi. Permasalahan ini mengindikasikan bahwa tantangan terbesar dalam mewujudkan keterpaduan data daerah tidak hanya terletak pada kesiapan infrastruktur TIK, melainkan belum optimalnya budaya berbagi data (data sharing culture) antar-instansi pemerintah.

Sebagai bentuk adaptasi atas keterbatasan alur data masukan tersebut, Diskominfo berhasil menerapkan langkah-langkah strategis dengan melakukan pendataan langsung terhadap kendala teknis OPD mitra, mengoptimalkan pengelolaan situs digital dan portal pendukung e-Government, serta memberdayakan program magang akademis guna menjaga akselerasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Provinsi Sumatera Selatan.

4.2 Saran

Guna mengoptimalkan peran Diskominfo sebagai Wali Data Daerah dan mempercepat terwujudnya ekosistem Satu Data di Provinsi Sumatera Selatan, Pemerintah Provinsi disarankan untuk menyusun dan menetapkan Standard Operating Procedure (SOP) pendelegasian data yang dilengkapi dengan tenggat waktu penyampaian yang tegas serta mekanisme sanksi maupun insentif administratif bagi OPD produsen data guna menekan keterlambatan pelaporan.

Dari sisi teknis operasional, Diskominfo perlu mendorong transformasi mekanisme pengiriman data manual menuju integrasi terotomatisasi berbasis Application Programming Interface (API) atau Web Services yang menghubungkan sistem informasi milik masing-masing OPD secara langsung dengan portal Satu Data Sumsel, sehingga pemutakhiran data dapat berjalan lebih cepat dan efisien.

Selain itu, diperlukan penyelenggaraan rapat koordinasi dan evaluasi berkala secara rutin yang dipimpin langsung oleh Sekretaris Daerah selaku Koordinator SDI tingkat provinsi guna mengikis ego sektoral antar-lembaga, disertai dengan program pembinaan literasi data serta pemahaman teknis aparatur mengenai standar metadata dan keselamatan data secara berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, Dinas Komunikasi dan Informatika. (2022). Sejarah. <https://kominfo.sumselprov.go.id/sejarah>
- [2] Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, Dinas Komunikasi dan Informatika. (2022). Visi dan Misi. <https://kominfo.sumselprov.go.id/visi-misi>
- [3] Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, Dinas Komunikasi dan Informatika. (2022). Bidang E-Government. <https://kominfo.sumselprov.go.id/egov>
- [4] Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, Dinas Komunikasi dan Informatika. (2022). Bidang Statistik. <https://kominfo.sumselprov.go.id/statistik>
- [5] Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, Dinas Komunikasi dan Informatika. (2022). Struktur. <https://kominfo.sumselprov.go.id/struktur>